

**ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN  
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA SERTA  
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**AYU TRIANI UTAMI**

**NIM.12020110141025**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Ayu Triani Utami

Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141025

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHINYA SERTA  
PENGARUHNYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI  
JAWA TENGAH**

Dosen pembimbing : Dr. Nugroho SBM, MSP

Semarang, 01 Juli 2014

Dosen Pembimbing

Dr. Nugroho SBM, MSP

NIP. 19610506 198703 1002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Ayu Triani Utami  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110141025  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP  
Judul Skripsi : **ANALISIS PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN FAKTOR-FAKTOR  
YANG MEMPENGARUHINYA SERTA  
PENGARUHNYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 8 Juli 2014**

Tim Penguji

1. Dr. Nugroho SBM, MSP (.....)
2. Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc (.....)
3. Akhmad Syakir Kurnia, M.Si. Ph.D (.....)

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE., M.Com., Ph.D., Akt.

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ayu Triani Utami, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 01 Juli 2014

(Ayu Triani Utami)  
NIM : 12020110141025

## MOTTO

"Sesungguhnya segala urusan itu ada di tangan Allah"  
(QS. Al-Imron : 154)

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"  
(QS. Alam Nasyrah :6-8)

"Success is not measured by wealth, success is an achievement that we want."

Rasa Syukur ku Persembahkan Untuk :

- ALLAH SUBHANA WATA'ALA atas segala petunjuk serta kemudahannya untuk menyelesaikan skripsi ini
- Kedua orangtua ku yang selalu memberi semangat dan perhatiannya hingga skripsi ini selesai
- Seseorang yang kucintai dan semua sahabat-sahabat yang kusayangi.

## ABSTRACT

*Development aims for the public welfare and implemented through government funding. Financing local government revenue comes from the area, one of which taxes. Which have the potential tax increase along with advances in technology and standards needs are secondary to the primary motor vehicle tax. Central Java as the province has the third highest in Java has a solid economy. The economy is directly supported by the transport sector. One example is a motor vehicle. The purpose of this study was to determine the development and contribution of motor vehicle tax (PKB) to PAD in Central Java province during 2003 to 2012, megidentifikasi influence the number of vehicles, number of residents, and the transportation sector to GDP acceptance of Motor Vehicle Tax (PKB) in Central Java Province, as well as policies that can be applied to increase the motor vehicle tax.*

*This study used a multiple linear regression model (Multiple Linear Regression Method) by the method of least squares or ordinary least squares (OLS) with time series data (time series) and SWOT Analysis. The dependent variable used is the number of motor vehicle tax revenue, while the independent variable is the number of population, number of vehicles, and the transportation sector GDP.*

*Based on the analysis, it can be concluded that the population is not a significant positive effect on the acceptance of CLA, while the number of vehicles and the transportation sector GDP showed a positive and significant impact on acceptance of PKB. Government strategies that can be used to improve motor vehicle tax revenues by applying the SWOT analysis is to reform the management of motor vehicle taxes both in terms of human resources, bureaucracy, services, socialization, technology improvements, and support facilities improvements in traffic safety.*

*Keywords: PAD, PKB, Number of inhabitants, Motor Vehicles, Transportation sector GDP.*

## ABSTRAK

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dilaksanakan melalui pembiayaan pemerintahan. Pembiayaan pemerintahan di daerah bersumber dari pendapatan daerah, salah satunya pajak. Pajak yang memiliki potensi semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Jawa tengah sebagai provinsi berpenduduk tertinggi ketiga di Pulau Jawa memiliki perekonomian yang padat. Perekonomian secara langsung didukung oleh sektor transportasi. Salah satu contohnya adalah kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, mengidentifikasi pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Tengah, serta kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS) dengan data runtut waktu (*time series*) dan Analisis SWOT. Variabel dependen yang digunakan yaitu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen yaitu jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan PDRB sektor transportasi.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PKB, sedangkan jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sektor transportasi menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB. Strategi yang dapat digunakan pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan analisis SWOT yaitu dengan menerapkan pembenahan pengelolaan pajak kendaraan bermotor baik dari sisi SDM, birokrasi, pelayanan, sosialisasi, peningkatan teknologi, maupun perbaikan fasilitas penunjang keamanan berlalu lintas.

Kata kunci: PAD, PKB, Jumlah penduduk, Kendaraan Bermotor, PDRB sektor Transportasi.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan segala proses studi di Universitas Diponegoro dan mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas akhir perkuliahan ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat beliau yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah” merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan Sarjana (Strata Satu) pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, arahan, bantuan, kerjasama, dorongan, semangat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta dan tersayang, Eddie Pranoto dan Ariyani Diah Sulistyowati yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, perhatian serta dukungan dalam segala hal yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Kakak-kakak tercinta, Arief Kristanto dan Bakhtiar Ari Prabowo, yang selalu menjaga, memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, perhatian serta dukungan terus menerus kepada penulis.
3. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D., selaku Dekan beserta seluruh staf pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.



4. Bapak Dr. Nugroho SBM, MSP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, bimbingan, waktu, kesabaran, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hastarini Dwi Atmanti, SE, M.si., selaku dosen wali atas petunjuk, bimbingan, saran dan arahan yang diberikan selama penulis berada di bangku kuliah.
6. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, M.Sc dan Bapak Akhmad Syakir Kurnia, M.Si. Ph.D selaku Dosen Penguji atas segala bimbingan dan koreksinya terhadap skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro.
8. Para Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang turut serta dalam membantu kelancaran birokrasi dan sebagainya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Diponegoro.
9. Bapak Mujiyanto selaku Kepala Bagian Perpajakan DPPAD beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat tersayang, my best casek Yani Dewi Erenesari yang selalu menghalang-halangi dan meremehkan penulis dalam penyusunan skripsi, Alhamdulillah itu menjadi motivasi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah menjadi tempat keluh kesah bagi penulis. Descha Amanda dan Iga Anjar sahabat super seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Manis Manja tersayang, Eka “Cupih”, Fani Zamzami, Dewi Utami, Yohand Maladzi, Vivi Christovani untuk waktu yang telah dilewati bersama selama ini dan setia menemani di saat sedih dan senang, memberikan kasih sayang, semangat, bantuan, dukungan, dan perhatian kepada penulis selama masa perkuliahan sampai akhir perjuangan. Semoga kelak kita sukses bersama.

12. Avin Tri Hardina, teman dekat terbaik yang kusayang yang tak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, semangat, bantuan, dukungan, perhatian dan menjadi tempat keluh kesah selama ini, terima kasih atas kesabaran dan waktu yang telah diberikan kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman jurusan IESP Reguler 2 angkatan 2010, atas doa, dukungan dan kerjasamanya, serta segala kebaikan yang diberikan selama kuliah.
14. Teman-teman KKN Tim II Desa Podo Kec. Kedungwuni yang juga menjadi keluarga baru, Shiffa “Ciripa”, mas Deri, mas Adit, Joni, Tika, Rara, Ayu, Ica terima kasih buat semangat dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini akhirnya selesai.
15. Superman Is Dead, Payung Teduh, Sheila on 7, Endank Soekamti, Taylor Swift, Coldplay, The Script dan masih banyak lagi atas playlist syahdunya yang menjadi semangat tersendiri dalam menyusun skripsi ini.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Namun dengan kekurangan tersebut, penulis berharap semoga skripsi ini dinilai oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan penulis yang dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca sekalian.

Semarang, 01 Juli 2014

Penulis,

Ayu Triani Utami

12020110141025

## DAFTAR ISI

		<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....		i
HALAMAN PERSETUJUAN.....		ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....		iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....		iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....		v
ABSTRACT.....		vi
ABSTRAK .....		vii
KATA PENGANTAR .....		viii
DAFTAR TABEL.....		xiv
DAFTAR GAMBAR .....		xv
DAFTAR LAMPIRAN.....		xvi
Bab I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
	1.2 Rumusan Masalah.....	10
	1.3 Tujuan Penelitian .....	11
	1.4 Manfaat Penelitian .....	11
	1.5 Sistematika Penelitian.....	12
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	14
	2.1 Landasan Teori .....	14
	2.1.1 Sejarah dan Pengertian Pajak .....	14
	2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak .....	18
	2.1.3 Pembagian Jenis Pajak.....	23
	2.1.4 Azas-azas Pemungutan Pajak .....	32
	2.1.5 Teori Pemungutan Pajak.....	33
	2.1.6 Syarat-syarat Pemungutan Pajak .....	36
	2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	36
	2.1.8 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak.....	38
	2.1.8.1 Tolak Ukur Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.....	39
	2.1.9 Pajak Daerah dan PAD .....	40
	2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	43
	2.1.10.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	43

2.1.10.2	Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor .....	43
2.1.10.3	Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor .....	44
2.1.10.4	Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	45
2.1.10.5	Masa Pajak dan SPTD .....	45
2.1.10.6	Ketetapan Pajak .....	46
2.1.10.7	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB .....	47
2.1.10.8	Dasar Perhitungan dan Tarif PKB .....	48
2.1.10.9	Keberatan dan Banding .....	49
2.1.10.10	Sanksi atas PKB .....	49
2.1.11	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	50
2.1.11.1	Kegunaan PDRB .....	52
2.1.11.2	PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi ....	53
2.1.12	Penelitian Terdahulu .....	56
2.1.13	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	64
2.1.14	Hipotesis Penelitian .....	66
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
3.1	Variabel dan Definisi Operasional .....	67
3.1.1	Variabel Dependen .....	67
3.1.2	Variabel Independen .....	68
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	70
3.2.1	Jenis Data .....	70
3.2.2	Sumber Data .....	71
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	71
3.4	Metode Analisis Data .....	72
3.4.1	Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor ....	73
3.4.2	Perhitungan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor .....	73
3.4.3	Analisis Regresi .....	74
3.4.4	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik .....	75
3.4.4.1	Deteksi Normalitas .....	75
3.4.4.2	Deteksi Autokorelasi .....	75
3.4.4.3	Deteksi Multikolinearitas .....	76
3.4.4.4	Deteksi Heteroskedastisitas .....	77
3.4.5	Uji Statistik .....	77
3.4.5.1	Uji Signifikansi Individu (Uji t) .....	77
3.4.5.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	79
3.4.6	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	80
3.4.7	Analisis SWOT .....	81
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
4.1	Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah .....	83
4.2	Deskripsi Variabel Penelitian .....	84
4.2.1	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	84
4.2.2	Pendapatan Asli Daerah .....	86
4.2.3	Jumlah Penduduk .....	88

4.2.4	Jumlah Kendaraan Bermotor .....	90
4.2.5	PDRB Sektor Transportasi .....	92
4.3	Analisis Data .....	94
4.3.1	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD. ....	94
4.3.2	Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor .....	95
4.3.3	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor .....	97
4.3.3.1	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	97
4.3.3.2	Persamaan Regresi.....	101
4.3.3.3	Pengujian Statistik .....	103
4.3.3.3.1	Analisis Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	103
4.3.3.3.2	Uji F .....	103
4.3.3.3.3	Uji t .....	104
4.3.4	Ananlisis SWOT .....	106
4.3.4.1	Evaluasi Faktor Internal dan Eksternal.....	106
4.3.4.2	Matriks SWOT .....	109
BAB V	PENUTUP.....	112
5.1	Kesimpulan .....	112
5.2	Saran .....	114
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	115
	DAFTAR PUSTAKA .....	116
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1      Penerimaan Indonesia Seluruh Sektor Tahun 2006-2010 .....	5
Tabel 1.2      Realisasi Penerimaan PKB di Jateng Tahun 2003-2012 .....	8
Tabel 2.1      Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	59
Tabel 4.1      Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Tahun 2003-2012.....	85
Tabel 4.2      Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2003-2012.....	87
Tabel 4.3      Data Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2003-2012 .....	89
Tabel 4.4      Data Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Tahun 2003-2012.....	91
Tabel 4.5      Data PDRB Sektor Transportasi Jawa Tengah Tahun 2003-2012.....	93
Tabel 4.6      Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD .....	95
Tabel 4.7      Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Tahun 2003-2010.....	96
Tabel 4.8      Uji Multikolinearitas .....	99
Tabel 4.9      Deteksi Autokorelasi .....	100
Tabel 4.10      Uji Autokorelasi .....	101
Tabel 4.11      Model Regresi .....	101
Tabel 4.12      Evaluasi Faktor Internal .....	107
Tabel 4.13      Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan .....	107
Tabel 4.14      Evaluasi Faktor Eksternal.....	108
Tabel 4.15      Identifikasi Peluang dan Ancaman.....	109
Tabel 4.16      Hasil Analisis SWOT .....	109

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Skema Pengelompokan Pajak.....	23
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....	65
Gambar 3.1 Kurva Distribusi t .....	78
Gambar 3.2 Kurva Distribusi F .....	80
Gambar 4.1 Pajak Kendaraan Bermotor.....	86
Gambar 4.2 Pendapatan Asli Daerah .....	88
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk.....	90
Gambar 4.4 Jumlah Kendaraan Bermotor .....	92
Gambar 4.5 PDRB Sektor Transportasi Jawa Tengah .....	94
Gambar 4.6 Deteksi Normalitas .....	98

## DAFTAR LAMPIRAN

## Halaman

Lampiran A	Surat rekomendasi dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang.....	118
Lampiran B	Surat ijin penelitian DPPAD Jawa Tengah .....	119
Lampiran C	Hasil olahan data <i>E-views</i> .....	120
Lampiran D	Kuisisioner SWOT .....	121



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya

melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan

kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam system pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi dewasa ini, sumber keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah (Kaho, 2002). Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan,

pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

Mengulas kembali pada pernyataan bahwa dalam proses pembangunan Indonesia membutuhkan ketersediaan dana yang besar, dana tersebut dapat berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas dan sektor non migas. Selain pinjaman luar negeri dan sektor migas dan non migas, ketersediaan dana dapat diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Hal ini dibuktikan dalam data yang diperoleh dari Kementrian Keuangan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Indonesia Seluruh Sektor Tahun 2006-2010**

Uraian	2006 (Real)	2007 (Real)	2008 (Real)	2009 (Real)	2010 (Real)
1. Penerimaan Perpajakan	409,2	491,0	658,7	619,9	723,3
a. Pajak Dalam Negeri	396,0	470,1	622,4	601,3	694,4
i. Pajak Penghasilan	208,8	238,4	327,5	317,6	357,0
1) Migas	43,2	44,0	77,0	50,0	58,9
2) Nonmigas	165,6	194,4	250,5	267,6	298,2
ii. Pajak pertambahan nilai	123,0	154,5	209,6	193,1	230,6
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	20,9	23,7	25,4	24,3	28,6
iv. BPHTB	3,2	6,0	5,6	6,5	8,0
v. Cukai	37,8	44,7	51,3	56,7	66,2
vi. Pajak lainnya	2,3	2,7	3,0	3,1	4,0
b. Pajak Perdagangan Internasional	13,2	20,9	36,3	18,7	28,9
i. Bea masuk	12,1	16,7	22,8	18,1	20,0
ii. Bea keluar	1,1	4,2	13,6	0,6	8,9
2. Penerimaan negara Bukan Pajak	227,0	215,1	320,6	227,2	269,2
a. Penerimaan SDA	167,5	132,9	224,5	139,0	168,8
i. Migas	158,1	124,8	211,6	125,8	152,7
ii. Nonmigas	9,4	8,1	12,8	13,2	16,1
b. Bagian Laba BUMN	21,5	23,2	29,1	26,0	30,1
c. PNPB Lainnya	38,0	56,9	63,3	53,8	59,4
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	0,0	2,1	3,7	8,4	10,8
<b>Total</b>	<b>636,2</b>	<b>706,1</b>	<b>979,3</b>	<b>847,1</b>	<b>992,5</b>

Sumber: Kementerian Keuangan tahun 2006-2010, diolah.

Seiring dengan peningkatan sistem perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang populer di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh

pengenaan pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan. Didalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang – Undang nomor 18 tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah Tingkat I yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian jenis pajak daerah Tingkat II terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Tarif pajak untuk daerah Tingkat I diatur dengan peraturan pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedang untuk daerah Tingkat II, selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dewasa ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 3-8. Penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Berdasarkan data kependudukan dari BPS menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki kepadatan penduduk terbesar ketiga di Indonesia setelah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yaitu pada tahun 2000 sebesar 31.223.300 penduduk dan pada tahun 2010 sebesar 32.380.700 penduduk. Dengan luas wilayah 34.864 km<sup>2</sup> menjadikan kependudukan di Jawa Tengah tergolong padat. Keadaan ini memicu meningkatnya kegiatan perekonomian di Jawa Tengah sehingga target dan realisasi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah pun ikut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan data pada tabel 1.2 dibawah ini tentang target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah pada tahun 2003-2012.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**di Jawa Tengah Tahun 2003-2012**  
**(dalam Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor</b>
2003	390.000.000.000	469.619.213.490
2004	511.000.000.000	626.757.790.856
2005	647.650.000.000	750.314.589.743
2006	800.000.000.000	894.478.102.367
2007	975.000.000.000	1.021.411.306.791
2008	1.250.000.000.000	1.194.793.800.921
2009	1.250.000.000.000	1.333.386.394.490
2010	1.305.000.000.000	1.544.313.644.030
2011	1.650.000.000.000	1.755.017.905.667
2012	1.915.000.000.000	2.024.106.323.231

Sumber : DPPAD, 2013, diolah.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa selama sepuluh tahun berturut-turut target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Perkembangan yang terus meningkat ini mencerminkan besarnya potensi yang ada dalam penetapan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Realisasi pajak kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan ini tentu mempengaruhi besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Dalam rangka proses pembangunan yang sedang dihadapi negara Indonesia, setiap daerah di



Indonesia berlomba-lomba dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerahnya melalui sektor pajak dimana sektor pajak ini akan memberikan kontribusi yang terus meningkat setiap tahunnya guna meningkatkan sumber dana pembangunan tiap daerahnya masing-masing sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan. Jumlah obyek kendaraan bermotor Provinsi Jawa Tengah ini didapatkan dari jumlah obyek kendaraan bermotor antar 35 Kabupaten/ Kota yang terdapat di Jawa Tengah. Pembagian wilayah pengenaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah sendiri dikoordinir dan dibagi sesuai UP3AD yang telah diatur oleh peraturan daerah masing-masing.

Keterkaitan antara jumlah penduduk, jumlah obyek kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah menjadikan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Semakin besar potensi dan realisasi pajak kendaraan bermotor maka akan semakin besar pula mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerahnya. Tidak terkecuali provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki prestasi dalam peningkatan sektor pajak. Berdasarkan data-data yang telah disajikan diatas dapat diketahui bahwa provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor dan pendapatan asli daerah. Potensi ini dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya jika pemerintah dapat mengelola dengan baik sehingga akan mencapai realisasi pajak kendaraan bermotor melebihi dari potensi atau target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan realisasi pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah dapat mengatur upaya

memlalui kebijakannya sendiri sehingga dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, target pajak yang terus ditingkatkan setiap tahunnya dan realisasi yang telah dicapai selalu melebihi target yang telah ditentukan mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan masih jauh dari potensi yang bisa didapatkan sehingga potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dari rumusan permasalahan tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 ?
- b. Bagaimana perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 ?
- c. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan PDRB sektor transportasi terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi Jawa Tengah ?

- d. Kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD provinsi Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012
- b. Mengetahui perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012
- c. Mengidentifikasi pengaruh jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan PDRB sektor transportasi terhadap PAD di Jawa Tengah.
- d. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

Melalui penelitian ini, diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peran dan kontribusi pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah

provinsi Jawa Tengah dan instansi yang terkait guna meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah di masa yang akan datang.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharap dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.
- d. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di waktu yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan berupa laporan penelitian.

Bab 2 mengemukakan tentang tinjauan pustaka. Pada bagian ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, teori tentang pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak kendaraan bermotor, tahun pajak, saat terutang pajak, dan wilayah pemungutan pajak serta penetapan pajak kendaraan bermotor. Bab 2 juga membahas penelitian-

penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, serta hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran yang dijadikan alur dalam penyusunan penelitian ini.

Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variable penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri dari jenis data dan sumber data. Dalam bab ini juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan kontribusi, analisis perkembangan pajak kendaraan bermotor, analisis regresi, dan analisis SWOT.

Bab 4 mengemukakan tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Dalam bab ini akan dijawab permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan.

Bab 5 yang sering disebut dengan bab penutup berisi tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan pemerintah atau instansi yang terkait tentang peningkatan kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi PAD. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan terdapat perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Sejarah dan Pengertian Pajak**

Sebagaimana diketahui tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit.

Indonesia merupakan negara yang menganggap bahwa peranan pajak memberikan kontribusi sangat besar dalam menopang pembangunan nasional. Penerimaan negara dari sektor pajak sendiri pada kenyataannya dari tahun ketahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat.

Apabila ditinjau dari sejarahnya, masalah pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu kala, walaupun saat itu belum dinamakan pajak. Pada jaman dahulu, “pajak” yang dimaksud merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela yang diberikan oleh rakyat kepada rajanya. Besar kecilnya pemberian sukarela tersebut ditentukan

atau ditetapkan oleh pihak rakyat. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi pemberian yang sifatnya dipaksakan dalam arti pemberian tersebut bersifat wajib, dan segala ketentuannya ditetapkan oleh negara secara sepihak.

Pemberian yang bersifat wajib tersebut yang juga biasa disebut dengan upeti. Maka yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan. Namun menurut negara bahwa pungutan yang dikenakan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yang meliputi kebutuhan untuk mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh, serta untuk melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang ekonomi, sosial, maupun kenegaraan. Dan perkembangan pemungutan pajak tersebut hingga kini yang bernama pungutan tersebut tetap ada, yaitu yang sering disebut dengan pajak. Dimana segala ketentuan tentang pemungutan pajak tersebut tidak lagi ditentukan oleh rakyat atau ditentukan oleh negara secara sepihak namun ditentukan oleh rakyat dan negara secara bersama-sama.

Pengertian pajak sendiri memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesoebroto (1998), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara (pemerintah). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subyek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar – Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat jasa – jasa timbal yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

P. J. A. Adriani mengemukakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut ahli ekonomi N.J Fieldmann dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia* ( 1949 ) memberikan batasan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra – prestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan



pemerintah serta dapat dipaksakan dan memiliki sanksi tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, pajak diperlukan untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sama halnya dengan berbagai macam pendapat ahli ekonomi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yg harus dibayar oleh penduduk sbg sumbangan wajib kpd negara atau pemerintah sehubungan dng pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dsb.

Pajak adalah suatu cara negara untuk membiayai perekonomiannya sendiri dan pengeluaran lainnya secara umum disamping kewajiban suatu warga negara. Pajak juga merupakan partisipasi masyarakat yang dirasa paling efektif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pajak dapat dijadikan alat sebagai penggerak partisipasi rakyat kepada negara.

Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain – lain, harus ditetapkan dengan Undang – Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun pajak ditinjau dari berbagai aspek antara lain dari aspek ekonomi adalah penerimaan negara yang di gunakan untuk mengarahkan kehidupan

bermasyarakat yang sejahtera. Dari sudut pandang hukum sudah jelas bahwa memang hukum dan pajak itu saling berhubungan, hukum pajak di Indonesia mempunyai hirarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keputusan Presiden dan sebagainya. Dari aspek keuangan pajak hanya menitikberatkan pada aspek keuangan karena merupakan bagian yang sangat penting mengingat dewasa ini keuangan negara tidak lagi semata-mata berasal dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, akan tetapi lebih berupa untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Sedangkan dari aspek sosiologi pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut sesuatu dampak terhadap masyarakat atas pemungutan dan hasil apakah yang disampaikan kepada masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak setidaknya mengandung beberapa unsur antara lain yaitu iuran/ kontribusi rakyat kepada negara dimana pihak lain atau pihak swasta tidak berhak memungut, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dan mempunyai kekuatan hukum, tanpa kontraprestasi atau dalam kata lain tanpa balas jasa dari negara yang dapat langsung ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran pemerintah, dan apabila terdapat surplus dapat dipakai untuk membiayai *public investment*.

### **2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak**

Apabila membahas tentang fungsi dan tujuan pajak maka fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara.

Dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Senada dengan tujuan pajak diatas, Nurksel, 1971 dalam Betty, 2011 berpendapat bahwa tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah (4) untuk memodifikasi pola investasi (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak antara lain menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* (1904) dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*” asas pemungutan pajak terdiri dari :

1. *Asas Equality*

Asas equality berarti asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai

dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak- mihak dan diskriminatif.

2. *Asas Certainty*

Yang dimaksud dengan asas certainty adalah asas kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

3. *Asas Convinience of Payment* (Asas Kesenangan)

Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

4. *Asas Efficiency*

Asas efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.

Sedangkan asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner terbagi menjadi :

1. *Asas Politik Finansial*

Asas politik financial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus memadai sehingga dapat membiaya pembangunan dan mendorong perekonomian negara.

2. Asas Ekonomi

Asas ini mengemukakan bahwa penentuan objek pajak harus tepat sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah.

3. Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak diskriminatif.

4. Asas Administrasi

Asas administrasi mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan dimana tempat membayar pajak.

5. Asas Yuridis

Yaitu segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang Undang.

Berbeda menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
3. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

5. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut mendorong kesadaran masyarakat untuk sukarela membayar sejumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak yang dikenakan kepada masyarakat harus sesuai dengan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh masyarakat tersebut.

Beberapa fungsi pajak yang sering kita dengar adalah fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur) yang masing-masing akan dibahas secara lebih rinci dibawah ini.

- a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber dana bagi negara. Dengan pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan uang sebesar-besarnya kedalam dalam kas negara sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk dapat membiayai pengeluaran negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

- b. Fungsi *Reguler*

Fungsi *regular* yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai fungsi *regulatory*, yaitu mengatur perekonomian guna menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilitas ekonomi.

### 2.1.3 Pembagian Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

**Gambar 2.1**  
**Skema Pengelompokan Pajak**



Sumber: <http://catatansmaku.blogspot.com/2011/08/pengelompokan-pajak.html>

## 1. Pajak Menurut Golongannya

Menurut Golongannya Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

### a) Pajak Langsung :

Dalam pengertian ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

### b) Pajak Tidak Langsung :

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak – pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas :

1. Penanggung jawab pajak, yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.



2. Penanggung pajak, yaitu orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak, yaitu orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Apabila ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut terpisah atau terdapat lebih pada satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

## **2. Pajak Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, Pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

### **a) Pajak Subyektif (bersifat perorangan) :**

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan – alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Sebagai contoh adalah pajak penghasilan orang pribadi, berhubungan antara pajak dan wajib pajak (subyek) adalah langsung, oleh karena besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar tergantung pada besarnya gaya pikulnya. Pada pajak-pajak subyektif ini keadaan wajib pajak sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang terutang.

### **b) Pajak Obyektif (bersifat kebendaan) :**

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya

kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

### **3. Menurut Lembaga Pemungutnya**

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

#### **a) Pajak Negara (Pajak Pusat) :**

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM). Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.
2. Pajak Penghasilan (PPh)  
 Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

4. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan bea Materai Tahun 1921).

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama staasblad 1924 No.291.

b) Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak – pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota, pemungutanya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing - masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing - masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

#### 1) Pajak Propinsi

Pajak-Pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

#### 2) Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

- a. Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel (2002:1) yaitu “pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau

fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur, di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

- b. Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (2002:1) yaitu pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

- d. Pajak Reklame, menurut Peraturan Daerah No.27 Tentang Pajak Reklame (2002:1) pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, media yang menurut bentuk susunan dan corak raganya untuk tujuan komersial di pergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau di dengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang di lakukan oleh pemerintah. Objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, nbaik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- h. Pajak Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak sarang Burung Walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- j. Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah salah satu jenis pajak/pungutan yang dibebankan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum (sah secara hukum), yang selanjutnya dapat disebut sebagai pajak. BPHTP dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual -beli tanah, tetapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, tukar lahan dan

lain – lain. Dasar hukum penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTP) adalah Pasal 1 Undang – undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dalam Undang – undang No. 20 Tahun 2000.

#### **2.1.4 Azas-Azas Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri.
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh



orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.

Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

### **2.1.5 Teori Pemungutan Pajak**

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran

premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
3. Teori Bakti, penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.
4. Teori Daya Pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah

yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak.

5. Teori Asas Daya Beli, Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.
6. Teori –teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dst. Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori gaya beli dan teori lainnya yang disebut di atas.

### **2.1.6 Syarat- Syarat Pemungutan Pajak**

Dalam sistem pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut agar tidak terjadi hambatan dan juga perlawanan dalam pembayaran pajak, antara lain syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu :

- a. Pemungutan pajak harus adil / syarat keadilan, artinya pemungutan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang / syarat yuridis, artinya pajak diatur dalam undang-undang dan memberi jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian/ syarat ekonomis, artinya pemungutan pajak tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
- d. Pemungutan pajak harus efisien / syarat finansial, sesuai dengan fungsi budgeter, bahwa biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Syarat pemungutan pajak harus sederhana, artinya dengan cara pemungutan yang sederhana, akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah menganut beberapa sistem antara lain :

### 1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus.

### 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

### 3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak ) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

### 2.1.8 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak

Menurut Nick Devas (1989) mengemukakan beberapa tolak ukur umum sebagai penilaian terhadap pajak daerah, yaitu :

1. Pertama, berdasarkan hasil (*yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak terhadap biaya pelayanan yang diberikan, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil yang akan didapat oleh pemerintah daerah, elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertambahan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Kedua, keadilan (*equity*), maksudnya dasar penetapan pajak dan kewajiban membayar bagi wajib pajak harus jelas, jangan sampai beban pajak yang dikenakan sekehendak pemerintah daerah.
3. Ketiga, prinsip efisiensi ekonomi, maksudnya beban pajak jangan sampai menjadi penghambat para produser berhenti berproduksi atau mengalihkan bidang usahanya atau bagi konsumen mengurangi konsumsi atau beralih ke barang alternatif lainnya.
4. Kempat, kemampuan menerapkan undang-undang atau peraturan perpajakan harus mendapat dukungan secara politis dan administrasi yang baik.
5. Kelima, kesesuaian beban pajak tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Prinsip ini menekankan kejelasan kepada daerah mana suatu beban pajak harus dibayar oleh wajib pajak.

### **2.1.8.1 Tolak Ukur Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD**

Untuk mengukur kontribusi peran pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dapat meningkatkan upaya dalam meningkatkan pajak daerah itu sendiri. Pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pemungutan pajak daerahnya, dengan menempuh cara melalui :

1. Upaya meningkatkan penerimaan pajak
2. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis pajak tertentu, antara lain dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru.
3. Peranan appraisal/evaluation terhadap aset-aset daerah.
4. Fungsi budgeter dari penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif

Berkaitan dengan ekstensifikasi pajak daerah, Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa walaupun pemerintah daerah di mungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 dengan Peraturan Daerah, sebaiknya tidak menambah jenis pajak daerah baru. Jika mau..menambah pungutan hendaknya yang bersifat retribusi. Ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

1. Pungutan retribusi langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna layanan public (*public service*). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan public karena masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.

2. Investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah. Penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Selanjutnya Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD namun tidak membebani masyarakatnya adalah dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah. Pada Kebanyakan Negara, PBB (*Property tax*) merupakan pajak daerah. upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah memperbaiki sistem perpajakan daerah, jika pemerintah daerah dapat memiliki sistem perpajakan daerah yang memadai, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar.

Menurut Devas (1989), di kebanyakan Negara *property tax* menyumbang lebih dari separuh PAD nya. Jika PBB dapat dijadikan pajak daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan pendapatan pajak daerah yang besar sehingga nantinya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengurus pajak-pajak yang kecil nilainya. Juga pemerintah daerah dapat menarik investor berinvestasi di daerahnya dengan memberikan insentif PBB misalnya berupa pemberian *local tax holiday* kepada investasi baru.

### **2.1.9 Pajak Daerah dan PAD**

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak Umum atau biasa disebut Pajak Pusat, yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang memungut adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Jika membahas tentang pajak daerah erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dimana pajak dan retribusi daerah memang merupakan sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar dalam proses pembangunan dan pembiayaan rumah tangga suatu daerah.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun

2004), Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Warsito, 2001 dalam Damang, 2011 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman, 2005 dalam Damang, 2011 Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

#### **2.1.10 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

##### **2.1.10.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

##### **2.1.10.2 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor**

Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah

provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.

#### **2.1.10.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
5. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.

#### **2.1.10.4 Objek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan :

1. Bandara
2. Pelabuhan laut
3. Perkebunan
4. Kehutanan
5. Pertanian
6. Pertambangan
7. Industri
8. Perdagangan
9. Sarana olah raga dan rekreasi

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

#### **2.1.10.5 Masa Pajak dan SPTD**

Pajak yang terutang merupakan PKB yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan

peraturan daerah tentang PKB yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi setempat.

Pada PKB pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan PKB merupakan satu kesatuan dengan pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya.

PKB yang terutang dipungut di wilayah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

#### **2.1.10.6 Ketetapan Pajak**

##### **1. Penetapan pajak dan ketetapan pajak**

Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh gubernur menetapkan PKB yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan oleh menteri luar negeri. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayaran Daerah (SKPDKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

##### **2. Surat Tagihan Pajak daerah (STPD)**

Gubernur dapat menerbitkan STPD jika PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang berjalan. Hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Selain ketentuan diatas, Gubernur juga dapat menerbitkan STPD apabila kewajiban pembayaran pajak terhutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT tidak dilakukan atau tidak sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, STPD juga merupakan sarana yang digunakan untuk menagih SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak.

#### **2.1.10.7 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan PKB**

##### **Pembayaran PKB**

PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.

Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

- a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar

2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak

### **Penagihan PKB**

Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

#### **2.1.10.8 Dasar Perhitungan dan Tarif PKB**

##### **Perhitungan PKB**

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

##### **Tarif PKB**

Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No.



65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

#### **2.1.10.9 Keberatan dan Banding**

##### **Keberatan**

Terjadi bila wajib pajak PKB yang tidak puas atas penetapan pajak yang dilakukan oleh gubernur dapat mengajukan keberatan hanya karena gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan adalah terhadap materi atau isi dari penetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Setelah melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu gubernur akan mengeluarkan keputusan atas pengajuan keberatan tersebut.

##### **Banding**

Keputusan keberatan yang diterbitkan oleh gubernur disampaikan kepada wajib pajak untuk dilaksanakan. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **2.1.10.10 Sanksi atas PKB**

Keterlambatan melaksanakan pendaftaran melebihi waktu yang ditetapkan / tanggal jatuh tempo, dikenakan denda berupa kenaikan sebesar 25% dari Pokok Pajak ditambah Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung saat terhutangnya pajak.

#### **2.1.11 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan per kapita dan berbagai instrumen lainnya. Dimana dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah. Angka Produk Domestik Regional Bruto sangat dibutuhkan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Beberapa alokator yang digunakan adalah nilai produksi bruto atau neto, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya yang dianggap cocok untuk menghitung nilai suatu unit produksi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan

harga pada tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam penghitungan ini menggunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Angka-angka PDRB dapat dengan tiga pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada disuatu wilaya/provinsi dalam periode tertentu (biasanya satu tahun).

Unit-unit produksi tersebut mencakup sembilan lapangan usaha yaitu 1. Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; 2. Pertambangan dan penggalian; 3. Industri pengolahan; 4. Listrik, gas, dan air bersih; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, hotel; 7. Pengangkutan dan komunikasi; 8. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; 9. Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b. Pendekatan Pendapatan

Pada pendekatan ini, PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto

sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan ini, PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi Pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor neto jangka waktu tertentu. Ekspor neto disini merupakan ekspor dikurangi impor.

**2.1.11.1 Kegunaan PDRB**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), manfaat yang dapat diperoleh dari Statistik Pendapatan Regional antara lain:

- a. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa oleh suatu provinsi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.
- b. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu region/provinsi.
- c. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan lajun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

- e. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan bagaimana produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar.
- f. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan menggunakan barang/jasa yang dihasilkan sektor ekonomi.
- g. PDRB menurut penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk pengukuran laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri, perdagangan antar pulau/provinsi.
- h. PDRB dan PRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB dan PRB per kepala atau persatu orang penduduk.
- i. PDRB dan PRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita.

#### **2.1.11.2 PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi**

PDRB sektor pengangkutan/ transportasi dan komunikasi merupakan PDRB yang mencakup angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan jasa komunikasi serta jasa penunjang komunikasi.

##### **a. Angkutan Kereta Api**

Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data Laporan Tahunan PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Nilai Tambah Bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi, yaitu menggunakan indeks produksi gabungan tertimbang penumpang dan ton-Km barang yang diangkut.

### **b. Angkutan Jalan**

Sub sektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor, seperti bis, taksi, dokar, becak, dan sebagainya. Nilai Tambah Bruto atas dasar harga berlaku dihitung didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum wajib uji. Data diperoleh dari laporan data oenunjang regional income yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten/Kota masing-masing Provinsi.

Rata-rata output dan rasio biaya antara menurut jenis kendaraan, diperoleh dari hasil survey BPS Kabupaten/Kota dan Tabel I-O tiap Provinsi 2000 yang di perbarui. NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi untuk setiap jenis angkutan jalan raya.

### **c. Angkutan Laut**

Kegiatan yang dicakup meliputi pengangkutan penumpang dan barang dengan kapal laut yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik nasional baik trayek dalam negeri maupun internasional.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari perkalian jumlah barang dan penumpang yang diangkut dengan rata-rata tarif per ton barang dan rata-rata per penumpang. Data jumlah barang dan penumpang yang diangkut diperoleh dari PT.Pelabuhan Indonesia. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dan ebagai deflatornya adalah IHK Transpor.

**d. Angkutan Udara**

Mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan lain, berkaitan yang dilakukan perusahaan penerbangan milik nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun internasional.

Nilai Tambah Bruto dihitung dengan pendekatan produksi. Data output dan struktur biaya diperoleh dari hasil survei terhadap perusahaan penerbangan yang ada di masing-masing provinsi. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi dimana sebagai deflatornya adalah IHK Transpor.

**e. Jasa Penunjang Angkutan**

Meliputi kegiatan pemberian jasa penyediaan fasilitas yang menunjang dan berkaitan dengan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, ekspedisi, bongkar muat, serta jasa penunjang lainnya.

**1. Terminal dan Parkiran**

Kegiatan ini mencakup pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan/armada yang membongkar atau memuat barang maupun penumpang, seperti terminal dan parkir, pelabuhan laut bandara, dan sungai. Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitas berlabuh, tambat, pandu, distribusi air tawar serta pencatatan muatan barang dan penumpang. Data tarif, rata-rata output per indikator produksi Survei Khusus Pendapatan Regional. Data produksi bersumber dari Perum Pelabuhan, data penunjang dan laporan Dinas LLAJR, NTB atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi, dengan deflatornya adalah IHK Aneka Barang dan Jasa.

## 2. Bongkar Muat

Kegiatan bongkar muat mencakup pemberian pelayanan bongkar muat angkutan barang melalui laut dan darat. Indikator produksi untuk bongkar muat melalui laut adalah jumlah barang yang dibongkar dan dimuat, yang datanya bersumber dari Perum Pelabuhan di masing-masing Provinsi. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara deflasi memakai IHK umum.

## 3. Jalan dan Jembatan Tol

Mencakup jasa penggunaan jalan dan jembatan tol yang hanya dikelola oleh PT. Jasa Marga. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2000 dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks kendaraan yang dirinci menurut golongan kendaraan yang melewati jalan tol.

### 2.1.12 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontribusi peran pajak kendaraan bermotor terhadap PAD antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman Pande Ariasih (2012) tentang Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah ProvinsiI Bali Tahun 1991-2010 menunjukkan bahwa Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. Selain itu Jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung



terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Vika Ferna Yustiva (2008) tentang Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi PKB yang terendah ialah pada tahun 2002 sebesar 43,06% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2006 sebesar 54,91%. Sedangkan kontribusi BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 44,73% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2002 yakni sebesar 56,95%. Dari hasil perhitungan efektivitas PKB yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 114,53% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 132,85%. Sedangkan efektivitas BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 100,23% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2004 yakni 141,98%.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Syafruddin (2003) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001 serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap PDRB sektor tersier sebesar 63,38% dengan

kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya(kendaraan bermotor) sebesar Rp.2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp.2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang sangat besar juga sangat mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB, namun hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih RP. 84.522.534.715. sulit dan tidak aktifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil slundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi pajak, serta adanya peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN II.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lintan Gupita Prasedyawati (2012) tentang Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011 menunjukkan bahwa PDRB, jumlah industry dan jumlah oenduduk secara simultan mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota Semarang, namun variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame di kota Semarang, sedangkan variabel PDRB perkapita dan jumlah industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. hasil analisis lainnya seperti efektivitas, proporsi, dan korelasi menunjukkan bahwa pajak reklame sangat erat kaitannya dengan

PAD, apabila pajak reklame meningkat maka PAD ikut meningkat, sebaliknya apabila pajak reklame menurun maka PAD ikut menurun.

Ringkasan berbagai penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ni Nyoman Pande Ariasih (2012)	Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010	jumlah penduduk, PDRB per kapita, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Kemandirian Keuangan Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yakni peneliti mendiskriptifkan hasil penelitian secara kualitatif tanpa perhitungan statistik dan kuantitatif yakni digunakan untuk melakukan perhitungan dengan angka-angka dan statistik. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB.</li> <li>- PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB.</li> <li>- Jumlah penduduk dan PDRB per kapita tidak berpengaruh langsung terhadap kemandirian keuangan daerah.</li> <li>- Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui</li> </ul>

					penerimaan PKB dan BBNKB.
2.	Sari Vika Ferna Yustiva (2008)	Kontribusi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pajak Daerah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati	PKB, BBNKB, Pajak Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yakni peneliti mendiskriptifkan hasil penelitian secara kualitatif tanpa perhitungan statistik dan kuantitatif yakni digunakan untuk melakukan perhitungan dengan angka-angka dan statistik. Dalam penelitian ini menghitung kontribusi dan efektivitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi PKB yang terendah ialah pada tahun 2002 sebesar 43,06% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2006 sebesar 54,91%.</li> <li>- Sedangkan kontribusi BBNKB yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 44,73% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2002 yakni sebesar 56,95%.</li> <li>- Dari hasil perhitungan efektivitas PKB yang terendah ialah pada tahun 2006 yakni sebesar 114,53% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 132,85%.</li> <li>- Sedangkan efektivitas BBNKB yang terendah</li> </ul>

					ialah pada tahun 2003 yakni sebesar 100,23% dan yang tertinggi ialah pada tahun 2004 yakni 141,98%.
3.	Faisal Syafruddin (2003)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta	Jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB sektor transportasi ,PKB dan BBNKB	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif yakni peneliti mendiskriptifkan hasil penelitian secara kualitatif tanpa perhitungan statistik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001 serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap PDRB sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya(kendaraan bermotor) sebesar Rp.2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp.2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%.</li> <li>- Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang sangat besar sangat</li> </ul>

					berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, namun hasil yang didapat belum optimal.
	Lintan Gupita Prasedyawati (2012)	Analisis Penerimaan Pajak Reklame di Kota Semarang Tahun 1990-2011	Jumlah penduduk, jumlah industri, PDRB perkapita	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda, metode analisis elastisitas, metode analisis efektivitas, metode analisis proporsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak reklame. nilai t-hitung sebesar 1,202 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,245 (<math>&gt;\alpha=5\%</math>) maka jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame</li> <li>- Variabel jumlah industri dan PDRB perkapita menunjukkan hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak reklame dimana masing-masing memiliki tingkat signifikansi yang sama yaitu sebesar 0,000</li> </ul>

					<p>(<math>\alpha=5\%</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis elastisitas dan efektivitas pajak reklame memiliki hubungan yang sangat erat terhadap PAD</li> </ul>
--	--	--	--	--	---



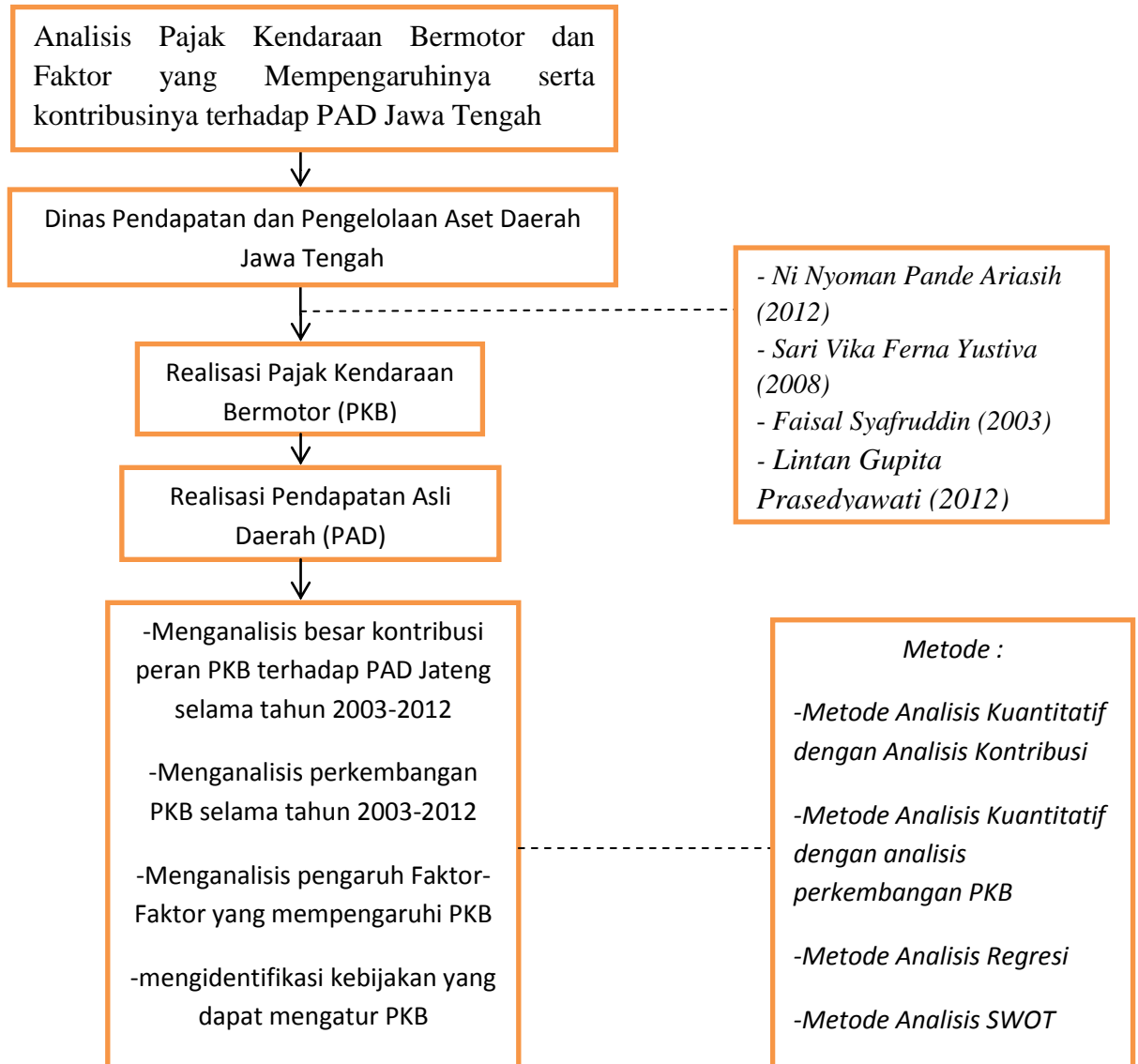
### **2.1.13 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pada penelitian ini digunakan kerangka pemikiran teoritis dimana penelitian yang berjudul Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Tengah ditujukan untuk menganalisis besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, menganalisis perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah, dan mengidentifikasi kebijakan yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah metode analisis kuantitatif dengan analisis kontribusi, analisis perkembangan PKB, metode analisis regresi, dan metode analisis SWOT.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### TUJUAN

1. Mengetahui besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012
2. Mengetahui perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2012
3. Mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah
4. Mengidentifikasi kebijakan yang mengatur Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah



#### **2.1.14 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga variabel jumlah penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2012.
2. Diduga variabel jumlah kendaraan bermotor memiliki hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2012.
3. Diduga variabel PDRB sektor Transportasi memiliki hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah tahun 2003-2012.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:60). Lebih lanjut Hatch dan Forhady memaparkan secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independen yaitu jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan PDRB sektor transportasi. Sedangkan definisi operasional diartikan sebagai seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep definisi operasional tersebut membantu kita untuk mengklasifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori khusus dari variabel.

##### **3.1.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya tergantung pada nilai variabel lain yang merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada variabel bebas (variabel independen). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan

adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor yang selama ini dikelola oleh pemerintah sebagai pajak negara termasuk dalam sumber pendapatan yang diserahkan pada daerah. Penyerahan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah. Untuk berlakunya suatu pajak yang diserahkan kepada Daerah diterbitkanlah Peraturan Daerah. Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor saat ini berdasar kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Satuan yang digunakan untuk mengukur pajak kendaraan bermotor adalah rupiah.

### **3.1.2 Variabel Independen**

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen sebagai berikut:

#### **1. Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus / kontinu. Penduduk yang berada atau tinggal dalam suatu daerah harus mengikuti peraturan daerah tersebut termasuk dalam hal peraturan pembayaran pajak yang digunakan untuk menopang pembangunan daerah mereka tinggal. Data jumlah penduduk diukur dalam satuan orang.

#### **2. Jumlah Kendaraan Bermotor**

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya

kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. Data jumlah kendaraan bermotor diukur dalam satuan unit.

### 3. PDRB Sektor Transportasi

PDRB sektor pengangkutan/ transportasi merupakan PDRB yang mencakup angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, termasuk jasa penunjang angkutan. Peran sektor pengangkutan dan komunikasi sangat penting dan menjadi indikator dalam melihat kemajuan ekonomi suatu wilayah. Sub sektor transportasi mempunyai peran penting bagi mobilitas perekonomian suatu daerah. PDRB sektor transportasi disini dihitung atas dasar harga konstan dan diukur dalam satuan Rupiah.

## 3.2 Jenis dan Sumber Data

### 3.2.1 Jenis Data

Data merupakan kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta), dapat berupa angka-angka, huruf, simbo-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat ‘bercerita’ banyak sehingga masih perlu diolah

lebih lanjut sehingga mampu menarik suatu kesimpulan, (Turban, 2010). Ketersediaan data merupakan suatu hal yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu penelitian ilmiah. Penelitian yang akan dibahas disini mengambil lokasi di Jawa Tengah, Provinsi yang cukup besar tingkat penggunaan kendaraan bermotornya.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperlukan dan harus diolah yaitu data primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya Marzuki, 2005 dikutip dari Lathifah 2013. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan petugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah bidang pajak. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber dan instansi-instansi yang terkait dengan penelitian, buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah, data jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah, data jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah, dan data PDRB sektor transportasi Jawa Tengah. Semua data tersebut diperoleh dari rentang waktu tahun 2003-2012.

### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi dan instansi-instansi pemerintah yang terkait seperti :

1. Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab ke pengelola data di DPPAD Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi atau lembaga terkait (Suharsimi Arikunto, 2002). Laporan-laporan yang terkait dengan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menyangkut jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor, dan PDRB sektor transportasi, data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dimaksudkan untuk mendapat bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat dan akurat kualitasnya.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka, dimana studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan membaca literature, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian.



### 3.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini merupakan penganalisaan dengan menggunakan peralatan analisis. Menurut Kuncoro (2003) penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subyek penelitian. Sedangkan menurut Nazir (2009) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan model matematis, statistik, atau computer. Sehingga metode deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang bertujuan untuk memaparkan dan mengungkapkan suatu masalah, kejadian, peristiwa sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999).

#### 3.4.1 Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Suprpto dalam Saleh (2012) analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun tersebut. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar peranan pajak kendaraan bermotor dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi PKB} = \frac{\sum \text{Penerimaan PKB}_{\text{tahun } n}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}_{\text{tahun } n}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.1)$$

### 3.4.2 Perhitungan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor

Setelah didapatkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, maka dapat menganalisis perhitungan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor. Perhitungan Perkembangan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung dengan cara :

$$(\sum \text{Penerimaan PKB tahun } 1 - \sum \text{Penerimaan PKB tahun } 0) \times 100\% \dots\dots\dots(3.2)$$

Dari hasil perhitungan perkembangan pajak kendaraan bermotor dapat diketahui besarnya tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Semakin besar presentase yang dihasilkan maka semakin meningkat hasil pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya.

### 3.4.3 Analisis Regresi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi dengan data runtut waktu (*time series*). Analisis regresi adalah suatu studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk menganalisis dan / atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai

rat-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui, Gujarati dalam Kuncoro (2004).

Untuk melakukan analisis, model matematis persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PKB = f(pnddk, kb, PDRBtrans) \dots \dots \dots (1)$$

Model matematis diatas kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut:

$$PKB = \beta_0 + \beta_1 pnddk + \beta_2 kb + \beta_3 PDRBtrans + \varepsilon_1 \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

PKB = Jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

pnddk = jumlah penduduk

KB = jumlah kendaraan bermotor

PDRB trans = PDRB sektor transportasi

$\varepsilon_1$  = random error

$\beta_0$  = intercept

$\beta_1$  = koefisien regresi

#### 3.4.4 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Deteksi penyimpangan asumsi klasik adalah serangkaian pendektesian yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias

jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*best linear unbiased estimator*) yaitu terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

#### **3.4.4.1 Deteksi Normalitas**

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak berlaku (Ghozali, 2005).

#### **3.4.4.2 Deteksi Autokorelasi**

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota-anggota serangkaian observasi yang diuraikan menurut waktu dan ruang (Gujarati 1997:2001). Konsekuensi adanya autokorelasi diantaranya adanya selang keyakinan menjadi lebar serta variasi dan standar error terlalu rendah.

Deteksi autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2005:95). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji formal untuk mendeteksi autokorelasi adalah model Breusch-Godfrey atau dengan nama lain uji *Langrange-Multiplier* (LM).

#### 3.4.4.3 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen dari suatu model regresi. Multikolinearitas berakibat kesulitan dalam melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan, (Gujarati,2003).

Multikolinearitas dalam penelitian dapat dideteksi dengan beberapa kaidah *rule of thumb* sebagai berikut:

- (a) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan dari hasil estimasi model empiris sangat tinggi, tetapi tingkat signifikan variabel independen berdasarkan uji t-statistik sangat kecil atau bahkan tidak ada variabel independen yang signifikan, maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas.
- (b) Auxiliary Regression yaitu dengan membandingkan nilai  $R^2$  regresi utama dengan nilai  $R^2$  regresi parsial. Regresi parsial didapatkan dengan meregresikan variabel-variabel independen secara bergantian. Apabila nilai  $R^2$  regresi parsial lebih besar dibandingkan nilai  $R^2$  regresi utama maka mengindikasikan adanya multikolinearitas.

#### 3.4.4.4 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian estimasi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tidak bias namun tidak efisien. (Gujarati,2003).

Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan model *Glejser* yang tersedia dalam program Eviews. Hasil yang perlu diperhatikan dari uji ini adalah nilai F dan *Obs\*Rsquared*, secara khusus adalah nilai probabilitas dari *Obs\*Rsquared*.

### 3.4.5 Uji Statistik

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis kuantitatif yaitu dengan model regresi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

#### 3.4.5.1 Uji Signifikansi Individu (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati,2003):

- 1)  $H_0 : \beta_1 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah penduduk terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.  
 $H_1 : \beta_1 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel jumlah penduduk terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.
- 2)  $H_0 : \beta_2 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah kendaraan bermotor terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.  
 $H_1 : \beta_2 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel jumlah kendaraan bermotor terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.

3)  $H_0 : \beta_3 \leq 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel PDRB sektor transportasi terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.

$H_1 : \beta_3 > 0$ , yaitu terdapat pengaruh positif signifikansi variabel PDRB sektor transportasi terhadap variabel pajak kendaraan bermotor.

Nilai  $t$  hitung dirumuskan dengan :

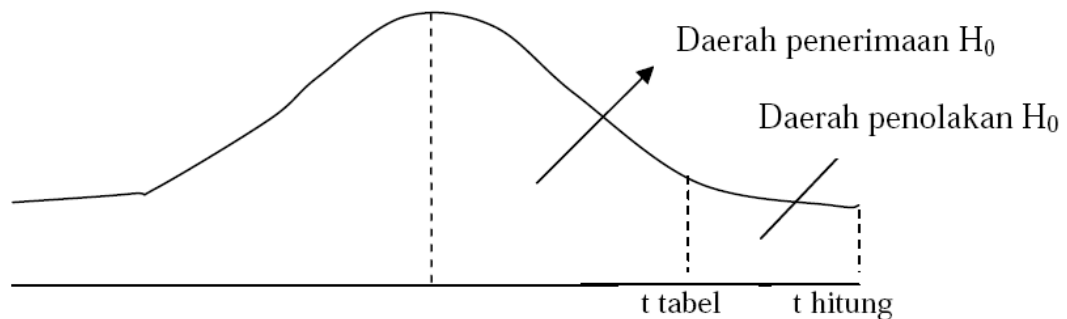
$$t_{hitung} = \frac{b_j}{Se(b_j)}$$

Dimana:

$b_j$  : koefisien regresi

$Se(b_j)$  : standard error koefisien regresi

**Gambar 3.1**  
**Kurva Distribusi  $t$  (one tail Test)  $\alpha = 0,05$**



Sumber: Gujarati, 2003

### 3.4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , yaitu tidak ada pengaruh signifikansi variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan PDRB sektor transportasi.

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ , yaitu terdapat pengaruh signifikansi variabel jumlah kendaraan bermotor, jumlah penduduk, dan PDRB sektor transportasi.

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka  $H_0$  tidak diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Menurut Gujarati (2003) nilai F dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Dimana:

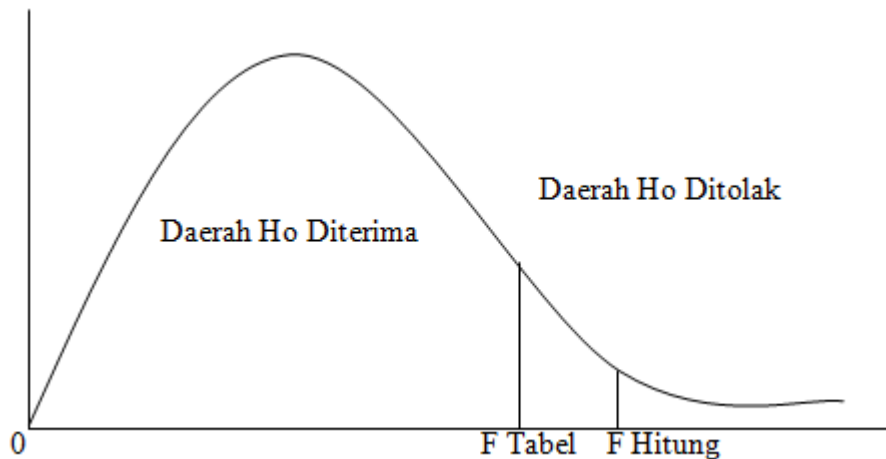
$R^2$  : Koefisien determinasi

$k$  : Jumlah variabel independen termasuk konstanta

$n$  : Jumlah sampel



**Gambar 3.2**  
**Kurva Distribusi F  $\alpha= 0,05$**



Sumber: Gujarati, 2003

### 3.4.6 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Dimana apabila nilai  $R^2$  mendekati 1 maka ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel dependen dan variabel independen dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dinyatakan dalam persentase. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dirumuskan :

$$R^2 = \frac{\sum(\hat{Y}_1 - \bar{Y})^2}{\sum(Y_1 - \bar{Y})^2}$$

Nilai  $R^2$  yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model.

Jika  $0 < R^2 < 1$  maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1) Nilai  $R^2$  yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
- 2) Nilai  $R^2$  mendekati satu, berarti variabel-variabel dependen mampu menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### **3.4.7 Analisis SWOT**

Analisis SWOT adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi. Analisis ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja oleh para pengelola. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan dan kelemahan. Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi tersebut (Ibnu Hasan, 2011).

Analisis SWOT digunakan sebagai strategi untuk mengalahkan musuh di medan pertempuran. Menurut Sun Tzu (dalam Freddy Rangkuti, 2005) konsep dasar pendekatan SWOT adalah untuk memenangkan sebuah pertempuran maka harus mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini metode SWOT lebih banyak digunakan untuk menyusun perencanaan strategi bisnis jangka panjang,

sehingga arah dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan jelas. Selain itu, dengan menggunakan analisis SWOT pengambilan keputusan dapat dilakukan secepat mungkin terkait dengan semua perubahan dalam menghadapi pesaingnya (Freddy Rangkuti, 2005). Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi internal eksternal instansi-instansi yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat ditentukan kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat ditempuh guna meningkatkan pajak kendaraan bermotor.